

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN
(Studi Kasus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
INTAN DWI RATNA
1916021006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN
(Studi Kasus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)**

**Oleh
INTAN DWI RATNA
1916021006**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERENCANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**OLEH :
INTAN DWI RATNA**

Perencanaan Rencana Induk Kelitbangan (RIRKD) Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen strategis yang menyelaraskan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan pembangunan penelitian dan pengembangan (litbang) di daerah tersebut. Dalam studi ini, digunakan pendekatan evaluasi melalui analisis deskriptif terhadap implementasi RIRKD serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, pengamat, dan pelaksana kegiatan kelitbangan di Lampung, serta studi dokumentasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program litbang.

Efektivitas perencanaan rencana induk kelitbangan dirancang dengan memperhatikan kebutuhan daerah, efektivitas implementasinya masih terbatas. Faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal juga memengaruhi keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan RIRKD di Provinsi Lampung.

Kata kunci: efektivitas, perencanaan.

ABSTRACT

PLANNING EFFECTIVENESS OF THE LAMPUNG PROVINCE REGIONAL ALITIGHTS MASTER PLAN

**BY :
INTAN DWI RATNA**

Lampung Province Regional Research and Development Master Plan (RIRKD) planning to support sustainable regional development. The Research and Development Master Plan is a strategic document that aligns regional government policies with research and development (R&D) development needs in the area. In this study, an evaluation approach was used through descriptive analysis of the implementation of RIRKD and the obstacles faced in achieving its objectives. Data was collected through interviews with policy makers, observers and implementers of R&D activities in Lampung, as well as documentation studies related to planning and implementation of R&D programs.

The effectiveness of the research and development master plan was designed taking into account regional needs, the effectiveness of its implementation is still limited. Factors such as lack of coordination between related institutions, lack of competent human resources, and budget limitations are the main obstacles in achieving the set targets. Apart from that, the monitoring and evaluation system which is not yet optimal also affects the success of the program. Therefore, this research recommends the need to increase coordination between institutions, strengthen human resource capacity, and improve the monitoring and evaluation system to increase the effectiveness of RIRKD planning in Lampung Province.

Key words: effectiveness, planning.

**Judul : Efektivitas Perencanaan Rencana Induk
Kelitbangan (Studi Kasus Badan Penelitian
Dan Pengembangan Daerah Provinsi
Lampung)**

Nama Mahasiswa : Intan Dwi Ratna

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916021006

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP 198106012010121003**

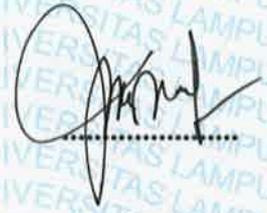
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Taban Maryanah

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP



Penguji : Drs. R. Sigt Krisbintoro, M.I.P



2. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama



Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP 196911032001121002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Intan Dwi Ratna
NPM.1916021006

Catatan:
Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Juni 2001 di Natar, dengan Papah bernama PONIJO dan Mamah bernama CIK RATNA. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak Tunas Melati II, di Natar tahun 2007, menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Natar tahun 2013, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Natar tahun 2016, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Natar dan lulus tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Kemudian pada bulan Desember 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Trans Tanjung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dan Pada Bulan Agustus 2022 Sampai Februari 2023 Penulis melakukan Magang di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Teruntuk yang terkasih Almarhum Papah ku Ponijo dan Mamah ku tersayang Cik Ratna ku persembahkan skripsi ini, hasil jerih payah ku selama aku berkuliah di jurusan ilmu pemerintahan. Terimakasih untuk cinta kasihmu untuk ku, anakmu..Terimakasih telah menjaga, mengasihi, melindungi ku dengan kesabaran, tetes keringat serta air mata.

Teruntuk Mba dan Adiku, Eka Ratna Sari dan Dzulaikha Anindia Triantika yang telah memberikan apresiasi.

Teruntuk diri sendiri terimakasih karna telah bertahan sejauh ini dan tidak pernah berhenti menyerah untuk mengerjakan skripsi ini.

Keluarga Ilmu Pemerintahan 2019

*Serta Almamater tercinta,
Universitas Lampung*

MOTTO

"Jangan takut itu tidak akan membuatmu mati"

(Hamada Asahi)

"Versi terbaik setiap orang berbeda –beda, jadi jangan biarkan siapapun
Membuatmu merasa tidak cukup"

(Lee Jenö)

SANWANCANA

Assalamualaikum wr, wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Perencanaan Rencana Indk Kelitbangan (RIK) Daerah Provinsi Lampung” dengan baik. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan besar dalam menyusun skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Dr. Tabah Maryanah, S.I.P, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
5. Darmawan Purba, S. IP, M. IP. , selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai skripsi ini terselesaikan, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya, terima kasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT
6. Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku, Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, , terima kasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT

7. Kepada Cinta pertama dan panutanku, Almarhum Papahku Ponijo dan Pintu Surgaku Mamahku Cik Ratna. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Alm papah bangga bahwa anak kedua yang bandel ini bisa menyelesaikan sekolahnya sampai sarjana, dan semoga mamahku selalu panjang umur, sehat dan selalu bahagia.
8. Kepada kakak pertama aku yang tak kalah penting kehadirannya, Eka Ratna Sari S. Pd. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis, Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah,serta mengajarkan apa arti kesabarann.
9. Kepada Adik aku tersayang Dzulaikha Anindiya Triantika, terima kasih telah menjadi adik yang selalu mengerti mood penulis terimakasih telah menjadi penghibur disaat penulis lelah mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada Kak Cici dan Putri terima kasih selalu menjadi teman, sahabat, saudara yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun serta selalu menjadi penghibur disaat penulis lelah dalam mengerjakan skripsi.
11. Kepada sepupuku Isa Apriyanti, terimakasih karna selalu membuat penulis ingin hidup sampai kapanpun, terimakasih karna selalu menjadi garda terdepan disaat penuis merasa dunia ini kosong.
12. Kepada Lee Jen, Terima Kasih karna selalu ada disetiap hidup penulis tidak pernah meninggalkan penulis, selalu ada setiap penulis sedih dan menjadi penyemangan penulis hidup.
13. Serta Terimakasih kepada, Park Sungjin, Youngk, Wonpil dan Dowoon karna selalu menemani hari hari penulis dalam mengerjakan skripsi.

14. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2019, yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kekeluargaan, semangat, dan kerjasama selama ini;
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang membacanya. Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan mereka terhadap penulis. Aamiin.

Bandar Lampung, 03 Februari 2025

Intan Dwi Ratna

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABERL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Pengertian Efektivitas	21
2.1.1 Ciri-ciri Efektivitas.....	21
2.1.2 Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi:	22
2.1.3 Teori Efektivitas.....	22
2.2 Pengertian Perencanaan	23
2.2.1 Definisi Perencanaan Menurut Para Ahli.....	23
2.2.2 Unsur-Unsur Perencanaan.....	24
2.2.3 Jenis-Jenis Perencanaan	24
2.3. Rencana Induk Kelitangan	24
2.4. Kerangka Pikir	25
BAB II IMETODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.3.1 Pencapaian Hasil Riset yang Relevan dengan Kebutuhan Daerah.....	27
3.3.2 Pengaruh Riset terhadap Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	27
3.3.3 Efisiensi dalam Pelaksanaan Perencanaan yang Dapat Dicapai dengan Sumber Daya yang Ada	28
3.4. Penentuan Informan	29

3.5.Data dan Sumber Data Peneltian.....	29
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7.Teknik Pengolahan Data	31
3.7.1.Reduksi Data	31
3.7.2.Penyajian Data	31
3.7.3.Menarik kesimpulan atau verifikasi	32
3.8. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	34
4.2 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	35
4.1.1 Kepala Badan	36
4.1.2 Sekretariat	37
4.1.3 Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya	39
4.1.4 Bidang Ekonomi Pembangunan Dan Kerjasama	41
4.1.5 Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	43
4.1.6 Bidang Penguatan Inovasi Dan Kebijakan Strategisdaerah	45
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Efektivitas Tujuan dan Implementasi RIK.....	48
4.2.2 Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan dalam RIKD	49
4.2.3 Sumber Daya dan Dukungan dalam Implementasi RIKD	49
4.2.4 Struktur Organisasi dan Koordinasi Lembaga dalam RIKD.....	49
4.2.5 Dampak Sosial-Ekonomi RIKD.....	50
4.3 Penelitian berdasarkan Teori Edward III (1980):.....	50
4.4 Pembahasan Penelitian.....	50
4.4.1 Efektivitas Tujuan dan Implementasi RIKD.....	51
4.4.2 Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan dalam RIKD	52
4.4.3 Sumber Daya dan Dukungan dalam Implementasi RIKD	52
4.4.4 Struktur Organisasi dan Koordinasi Lembaga dalam RIKD.....	53
BAB V KESIMPULAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Stakeholders Kelitbangan	3
Tabel 1.2 Daftar Kajian Policy Paper Tahun 2017-2019	7
Tabel 1.3 Rencana Kajian Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangka pikir.....	25
Gambar 2. Struktur organisasi balitbangda lampung	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sector pembangunan. Tidak mengherankan jika pengambil kebijakan di negara-negara maju terlebih dulu melakukan kegiatan kajian dan litbang sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu tindakan (*policy*).

Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasari pada kebutuhan riil daerah serta tata kelola yang baik dari potensi daerah, dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas, menurut amanat UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah bahwa kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah daerah harus dapat merumuskan kebijakan yang bersifat inovasi dan didukung oleh kemampuan dalam menguasai ilmu dan teknologi. Menurut pasal 387 UU No. 23 Tahun 2014 dalam merumuskan kebijakan inovasi.

Pemerintah memerlukan langkah-langkah manajemen strategis untuk dapat merumuskan dan menyelesaikan masalah kebijakan, yang hanya dapat dilaksanakan apabila dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan didahului dengan proses kelitbangan. Berikut manajemen strategi yang ditawarkan oleh Brinkerhoff & Crosby, dalam menyelesaikan masalah.

Meskipun bukan satu-satunya, kelitbangan menjadi salah satu dasar dari terciptanya inovasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri No. 17 Tahun 2016), kelitbangan diartikan sebagai kegiatan ilmiah dalam bentuk penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Memperhatikan pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari kelitbangan adalah inovasi. Mengingat pentingnya inovasi dan bagaimana kelitbangan memainkan peran vital dalam mendorong inovasi-inovasi tersebut, maka diperlukan perencanaan kelitbangan sehingga bisa didapat hasil yang lebih optimal dengan berbekal sumber daya kelitbangan yang terbatas. Permendagri No. 17 Tahun 2016 mengamanatkan rencana kelitbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Rencana Induk Kelitbangan (Rinduk) dengan periode perencanaan selama lima tahun.

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program kelitbangan berbasis pada inovasi daerah, dalam menyikapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, potensi daerah dan layanan publik. Perlu dipahami berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga kelitbangan daerah, untuk mencapai hasil yang maksimal lembaga kelitbangan daerah perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Kelitbangan (RIK).

Efektivitas perencanaan rencana induk pembangunan daerah di Provinsi Lampung ditentukan oleh beberapa faktor kunci, termasuk perumusan kebijakan yang komprehensif, implementasi yang konsisten, serta evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan strategis yang penting adalah Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Lampung 2019-2024. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan penelitian serta pengembangan. Tujuan utamanya adalah memberikan arah kebijakan untuk program pembangunan penelitian dan pengembangan di Provinsi Lampung, merumuskan target kinerja yang mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD 2019-2024, menjadi acuan dalam penyusunan rencana induk dan rencana kerja tahunan kelitbang, serta mengidentifikasi isu-isu strategis untuk perumusan rencana kerja kelitbang.

Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 juga telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta memastikan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipertimbangkan. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas perencanaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 mengidentifikasi beberapa permasalahan, seperti belum optimalnya integrasi kebijakan percepatan penurunan stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta kurangnya pengawasan dan koordinasi dalam pembangunan kawasan perdesaan. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek perencanaan dan implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Lampung telah memiliki kerangka perencanaan yang komprehensif, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan dan

evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Tabel 1.1 Stakeholders Kelitbangan

No	Lembaga	Peran	Pelaksanaan
1.	Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi sebagai Lembaga	Penyediaan SDM litbang Pelaksanaan litbang, diseminasi litbang, alih teknologi, pemanfaatan litbang	Melalui perkuliahan Melalui LPPM, Laboratorium, KKN, pengabdian masyarakat
2.	Litbang Pemerintah	Iklim kondusif, Fasilitasi, stimulasi, motivasi Kebijakan, anggaran	Melalui DRN, DRD, Lomba Krenova, Insentif Penelitian Melalui APBN, APBD
3.	Pemerintah sebagai Lembaga Litbang	Pelaksanaan litbang, diseminasi litbang, alih teknologi, pemanfaatan litbang	Melalui OPD Kelitbangan
4.	Lembaga Litbang (PT, Pemerintah, swasta) Badan Usaha	Pelaksanaan litbang, diseminasi litbang, alih teknologi, pemanfaatan litbang Pelaksanaan litbang, diseminasi litbang, alih teknologi, pemanfaatan litbang	Melalui lembaga litbang instansi ybs Melalui lembaga litbang instansi ybs
5.	Masyarakat	Pelaksanaan litbang, diseminasi litbang, alih teknologi, pemanfaatan litbang	Melalui kelitbangan swadaya masyarakat

Sumber: Permendagri No. 17 Tahun 2016

Indonesia baru memiliki Undang-Undang terkait kelitbangan pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk tingkat pemerintah daerah, Undang-Undang ini secara khusus mengatur tentang fungsi, kelembagaan, peran, dan pembiayaan dalam sisten nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan dari Undang-Undang ini untuk pemerintah daerah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Inovasi sendiri, oleh peraturan dimaksud, diartikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Secara lebih ringkas, World Bank (2010) mendefinisikan inovasi sebagai teknologi atau cara yang baru bagi masyarakat tertentu. Implikasinya adalah, baru disini tidak harus berarti baru yang sama sekali baru. Bisa jadi suatu cara sudah lama diterapkan oleh masyarakat A, tetapi bagi masyarakat B yang belum pernah mengenalnya sebelumnya, kemudian mempraktekkannya, maka itu adalah inovasi bagi masyarakat.

1.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Rinduk adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05 – 474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019)

1.1.3 Daftar Kajian Policy Paper Tahun 2017-2019

Berdasarkan permasalahan dan isu beriku Daftar Kajian Policy Paper Tahun 2017-2018. Adapun Daftar Kajian Policy Paper Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Daftar Kajian Policy Paper Tahun 2017-2019

TAHUN	NO.	URAIAN	KET
2017	1.	Analisis Survey Situs Observatorium Gunung Betung Tahura - War Provinsi Lampung Hilirisasi Ubi Kayu	

TAHUN	NO.	URAIAN	KET
	2.	Peningkatan Daya Saing Provinsi Lampung Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna “ Gerbang Pelana”	
	3.	Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Program (Money Follow Program) Dalam Penyusunan APBD Provinsi Lampung 2017	
	4.	Membangun Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung	
	5.	Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Provinsi Lampung	
	1.	Dokumen Kajian Kerjasama Daerah Dalam Pengembangan Aglomerasi Perkotaan “BALAMEKAPINGTATA”	Di tindak lanjuti oleh Dinas Perkebunan
	2.	Penyusunan Kajian Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa	Di tindak lanjuti oleh Dinas Pertanian
	3.	Dokumen Kajian Karakteristik dan Design Kelembagaan Kemitraan Hulu	
2018	4.	Hilir Pasokan Kuantitas, Kualitas Air Das Way Sekampung	
	5.	Penyusunan Dokumen Kajian Kereta Api Analisis Perumusan dan Rekomendasi	
	6.	Bidang Pengembangan Perekonomian Daerah Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Lampung	
2019	1.	Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	Di tindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan
	2.	Roadmap Pengembangan Penerapan Teknik Budidaya dan Pascapanen Kopi Berkelanjutan di Provinsi Lampung	
	3.	Teknologi Pengolahan Tepung Ubi Kayu Tinggi Protein	
	4.	Analisis Kebijakan Penanganan Ketimpangan Antar Daerah (<i>Betwen and within</i>) di Provinsi Lampung.	
	5.	Penyusunan Dokumen Kajian terkait Jaringan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2019	
	6.	Penyusunan Kajian Kelembagaan Pariwisata Pada Tingkat Desa; Studi Kasus BUMDes Sektor Pariwisata Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung	

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Guna mendukung tema pembangunan yang tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, berikut ini merupakan rencana kajian yang dilakukan untuk setiap tahun :

Tabel 1.3 Rencana Kajian Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI
2020	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar yang bernilai Ekonomis 2. Kajian Pengelolaan Usaha Pertambangan berdampak kesejahteraan masyarakat 3. Kajian pembentukan kelembagaan dan penyusunan roadmap lada di Provinsi Lampung 4. Kajian pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tol di Provinsi Lampung
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian pemetaan wilayah rawan konflik di 5 Kabupaten 2. Kajian collaborative government dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah 3. Kajian pembentukan kawasan pendidikan keagamaan di Provinsi Lampung 4. Kajian Jaringan penelitian pendidikan Provinsi Lampung 5. Rekomendasi kebijakan tentang inovasi daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian penilaian penyerapan carbon pada hutan di Provinsi Lampung 2. Kajian perlintasan tidak sebidang jalur kereta api di Provinsi Lampung 3. Collaborative government dalam mendukung kartu petani Berjaya (peneliti mandiri) 4. Kajian implementasi pengembangan kopi berkelanjutan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di tingkat koperasi produsen (peneliti mandiri) 5. Kajian kesesuaian lahan dengan varietas lada (peneliti mandiri)
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian potensi hilirisasi pisang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Kajian kesiapan teknologi informasi untuk mendukung industry 4.0 3. Kajian kawasan strategis bakauheni 4. Penyusunan blueprint petani maju dan Berjaya 5. Kajian dan evaluasi pengelolaan konektivitas pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Kajian peningkatan peran CSR dalam peningkatan pendapatan masyarakat 7. Penyusunan dan evaluasi pengembangan investasi daerah 8. Kajian pemanfaatan limbah untuk energy dan ramah lingkungan 7. Grand Design Pemberdayaan Masyarakat Tambang
2021	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian penguatan kelembagaan desa 2. Kajian smart school mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknolog	3. Kajian evaluasi kebijakan bidang pendidikan dan SDM 1. Kajian kebijakan perencanaan integrasi transportasi antarmoda pembangunan JTTS 2. Kajian persepsi masyarakat terhadap kebutuhan transportasi publik 3. Kajian kebijakan peningkatan literasi masyarakat Provinsi Lampung 4. Kajian pengembangan kawasan komoditi kopi melalui perencanaan manajemen rantai pasok 5. Kajian pembentukan kawasan Geopark Di Provinsi Lampung 6. Kajian potensi budidaya pelestarian ikan jelabat di Provinsi Lampung
2022	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian peningkatan daya saing petani dalam mendukung KPB 2. Kajian pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru 3. Study pengelolaan pasar tradisional berbasis pertanian 4. Kajian pengembangan pariwisata berbasis agro 5. Kajian pengembangan transportasi di kawasan wisata 6. Pengembangan perumahan adat dan kawasan terpadu 7. Kajian pengembangan potensi komoditas ikan sidat berbasis kearifan local
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1. Potret praktik baik pemerintahan desa di Provinsi Lampung 2. Kajian perencanaan pembangunan sektor pendidikan 3. Kajian evaluasi kebijakan bidang perekonomian/perindustrian 4. Kajian Desain pembelajaran efektif pasca pandemic covid-19 5. Kajian kebijakan pemerintah daerah 6. Rapergub Tentang Riset dan Inovasi Daerah
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1. Kajian dampak jalan tol terhadap perekonomian 2. Kajian perumusan kebijakan bidang penguatan inovasi daerah 3. Kajian jumlah produksi biji kopi yang dikelola koperasi produsen untuk memenuhi kebutuhan kuota ekspor 4. Evaluasi reformasi di birokrasi dan pelayanan public di Provinsi Lampung 5. Kajian interkoneksi moda transportasi di Provinsi Lampung 6. Kajian hilirisasi pisang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 7. Pengembangan teknologi untuk mendukung distribusi logistic	
2023	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian komoditas unggulan untuk peningkatan pendapatan petani 2. Kajian pengembangan usaha poktan berbasis ekonomi koperasi 3. Kajian penguatan kelembagaan petani untuk kemudahan usaha 4. Kajian strategis 2023 perencanaan lumbung ternak dan pangan 5. Penataan kawasan pesisir berbasis ruang darat dan laut terintegrasi 6. Kajian pengembangan permukiman tahan bencana 7. Kajian Pembentukan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI
	8. Optimalisasi peran DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan 9. Rancangan Model Inkubasi Riset dan Bisnis	
2024	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian program pembangunan desa 2. Kajian revitalisasi SMK ke dunia kerja 3. Kajian Evaluasi kebijakan bidang pertanian 4. Inisiasi Pembentukan Science Teckno Park di Provinsi Lampung
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi rencana dan pedoman/panduan Green Innovation Development (GID) 2. Kajian kebutuhan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata 3. Kajian Implementasi dukungan infrastruktur, transportasi dan perizinan ekspor kopi ke pasar dunia 4. Kajian model inkubator bisnis untuk pengembangan UMKM di Provinsi Lampung 5. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 6. Pengembangan Data Center dan Jejaring Riset di Provinsi Lampung
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian kawasan ekonomi terpadu dan terintegrasi 2. Kajian pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Kajian pemberdayaan BUMD strategis dan pengembangan usaha 4. Evaluasi Strategis pelaksanaan tani Berjaya dan rekomendasi berkelanjutan 5. Poadcast Desiminasi Kelitbangan dalam Meningkatkan Inovasi Daerah
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependuduka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian kawasan ekonomi terpadu dan terintegrasi 2. Kajian pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Kajian pemberdayaan BUMD strategis dan pengembangan usaha 4. Evaluasi Strategis pelaksanaan tani Berjaya dan rekomendasi berkelanjutan 5. Poadcast Desiminasi Kelitbangan dalam Meningkatkan Inovasi Daerah
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Smart Village di Provinsi Lampung 2. Kajian kearifan budaya local 3. Pengembangan Kawasan Pendidikan Vonasi Terintergrasi (Integreated Vacationl Village) 4. Inventarisasi Tradisi Kuliner Lampung

Sumber :Renstra Tahun 2019-2024 Balitbangda Provinsi Lampung

Kegiatan penelitian dan pengembangan (*litbang*) memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, mendorong inovasi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan *Rencana Induk Kelitbangan Daerah* (RIKD) menjadi landasan

strategis untuk mengintegrasikan kebutuhan pembangunan berbasis data dan sains di Provinsi Lampung. Sebagai provinsi yang memiliki beragam potensi di bidang pertanian, kelautan, pariwisata, dan industri, Lampung menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pemanfaatan yang belum maksimal, sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan
3. Infrastruktur dan Teknologi: Keterbatasan dalam akses terhadap teknologi modern di beberapa sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.
4. Kebutuhan Inovasi Berbasis Lokal: Tingginya urgensi solusi inovatif berbasis kearifan lokal untuk mengatasi isu spesifik daerah.

Melalui RIKD, pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan:

1. Keterpaduan Visi dan Misi: Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan litbang dan agenda nasional.
2. Daya Saing Daerah: Memanfaatkan potensi sumber daya manusia, alam, dan teknologi untuk menghasilkan inovasi yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor.
3. Pembangunan Berbasis Bukti (evidence-based policy): Menguatkan peran riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan publik.

Namun, efektivitas pelaksanaan RIKD sering kali menghadapi tantangan, seperti:

1. Rendahnya tingkat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
2. Kurangnya alokasi anggaran untuk penelitian dan inovasi.
3. Terbatasnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang berdampak pada implementasi yang tidak optimal.

Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) Provinsi Lampung berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan program kelitbangan di daerah. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan sejalan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah,

serta untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui rekomendasi kebijakan yang relevan. Efektivitas perencanaan Rencana Induk Kelitbangan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Penyusunan Dokumen yang Komprehensif: Balitbangda Provinsi Lampung telah menyusun dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program kelitbangan. Dokumen ini memuat strategi dan indikasi program yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Sinergi dan Koordinasi Antar Lembaga: Efektivitas kelitbangan juga ditentukan oleh kualitas koordinasi dan sinergi antara organisasi perangkat daerah serta lembaga di luar pemerintahan. Balitbangda berperan sebagai koordinator, mediator, dan fasilitator dalam meningkatkan kualitas pembangunan melalui kegiatan kelitbangan.
3. Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi: Hasil riset dan inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan daerah. Misalnya, presentasi enam riset dan inovasi unggulan oleh UIN Raden Intan Lampung pada Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Lampung menunjukkan upaya integrasi hasil penelitian ke dalam kebijakan daerah.
4. Peningkatan Kapabilitas dan Penyusunan Peta Jalan: Rapat Koordinasi Kelitbangan dengan tema "Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Serta Penguatan Kapabilitas dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan" menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapabilitas dalam perencanaan dan implementasi kelitbangan.

Secara keseluruhan, perencanaan Rencana Induk Kelitbangan di Provinsi Lampung telah menunjukkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan daerah. Penelitian dan pengembangan (*research and development* – R&D) memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan sumber daya alam semata, tetapi juga

mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menyusun Rencana Induk Kelitbangan (Riset dan Pengembangan) sebagai landasan strategis bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan inovasi. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap riset dan pengembangan yang dilakukan dapat menjawab tantangan pembangunan serta mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Namun, efektivitas implementasi Rencana Induk Kelitbangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya integrasi antara hasil penelitian dengan kebijakan, keterbatasan anggaran, serta minimnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana perencanaan Rencana Induk Kelitbangan di Provinsi Lampung telah berjalan secara efektif dalam mendorong pembangunan berbasis inovasi.

Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaan kelitbangan, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan kapasitas riset dan inovasi di Provinsi Lampung serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berbasis pengetahuan. Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, penelitian dan pengembangan (research and development – R&D) menjadi faktor utama dalam menentukan daya saing suatu daerah. Pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi juga keharusan agar suatu daerah dapat berkembang secara berkelanjutan, mandiri, dan kompetitif.

Sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang besar, Provinsi Lampung memiliki berbagai sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan industri pengolahan. Namun, tantangan utama dalam

pengembangan sektor-sektor ini adalah ketergantungan terhadap metode konvensional serta kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) telah menyusun Rencana Induk Kelitbangan (Riset dan Pengembangan) sebagai pedoman strategis dalam pengembangan inovasi daerah. Rencana Induk Kelitbangan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi yang dapat menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
2. Membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
3. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Namun, dalam implementasinya, efektivitas perencanaan Rencana Induk Kelitbangan di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

1. Kurangnya integrasi antara hasil penelitian dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga penelitian yang dihasilkan kurang berdampak pada pengambilan keputusan.
2. Keterbatasan anggaran untuk riset dan pengembangan, yang masih jauh dari standar ideal untuk mendukung inovasi secara maksimal.
3. Minimnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, sehingga kolaborasi dalam pengembangan inovasi kurang optimal.
4. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur riset, yang menyebabkan pengembangan teknologi dan inovasi berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain.

1.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian menurut Setiawan et al. (2016) , Pentingnya Integrasi Riset dalam Pembangunan Daerah, mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh penguatan sektor riset dan inovasi. Mereka menemukan bahwa banyak daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program riset terencana yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan lokal. Keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penelitian ilmiah dapat mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penelitian menurut Rizki & Kurniawan (2018) , Analisis Rencana Induk Kelitbangan Daerah di Provinsi Lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RIKD sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Penelitian ini menyoroti kurangnya koordinasi antara lembaga penelitian dan sektor pemerintah daerah, yang menghambat efektivitas kebijakan litbang. Tidak ada integrasi yang memadai antara hasil riset dan kebijakan pemerintah daerah, sehingga banyak inovasi yang tidak diimplementasikan secara optimal di lapangan.
3. Penelitian menurut Mulyana et al. (2017) Pentingnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Kelitbangan manusia, ditemukan bahwa keterbatasan keterampilan SDM dalam penelitian menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan kelitbangan yang efektif. Dalam konteks Provinsi Lampung, pengembangan kapasitas riset di perguruan tinggi dan lembaga penelitian daerah menjadi faktor krusial. Program pelatihan dan pengembangan SDM di bidang riset sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang berbasis pada kebutuhan daerah.

4. Penelitian menurut Mulyadi (2019) , Model Kolaborasi Antara Pemerintah, Akademisi, dan Industri penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat mempercepat penerapan hasil riset dalam sektor industri lokal, serta meningkatkan daya saing daerah. Kolaborasi yang terstruktur antara sektor publik, akademisi, dan industri dapat menghasilkan inovasi yang langsung bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara riset dan penerapannya di lapangan.
5. Penelitian Menurut Prasetyo & Harsono (2020) Monitoring dan Evaluasi dalam Kebijakan Litbang Daerah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kelitbangan. Mereka menemukan bahwa kelemahan dalam sistem M&E sering kali menyebabkan kebijakan kelitbangan tidak terpantau secara baik dan tidak terukur dampaknya. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan bukti dapat membantu pemerintah daerah untuk menilai efektivitas kebijakan kelitbangan dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan.
6. Penelitian Menurut Indrawati (2021) Penggunaan Teknologi dalam Kelitbangan Daerah mengkaji bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempercepat implementasi riset dan inovasi di daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK untuk kolaborasi penelitian dan diseminasi hasil riset sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan kelitbangan. Penggunaan teknologi digital, seperti platform kolaborasi berbasis cloud dan sistem informasi manajemen riset, dapat mempercepat proses distribusi informasi dan adopsi inovasi di daerah. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan RIKD di daerah, agar dapat menciptakan dampak yang positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas peran kelitbangan dalam pembangunan daerah, masih minim kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas perencanaan RIK di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis efektivitas perencanaan RIK di Balitbangda Provinsi Lampung, melihat kendala

dan faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ini, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas perencanaan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) di Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan dan implementasi RIK di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana peran pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, dalam mendukung efektivitas RIK?
4. Apa kendala utama yang dihadapi dalam perencanaan dan implementasi RIK di Provinsi Lampung?
5. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan RIK di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian ini bertujuan, adapun tujuan utama dari penelitian ini antarlain :

1. Menganalisis kualitas perencanaan Rencana Induk Kelitbangan di Provinsi Lampung berdasarkan prinsip perencanaan strategis, termasuk aspek kelengkapan data, metodologi, serta relevansi dengan kebutuhan daerah.
2. Mengidentifikasi sejauh mana implementasi perencanaan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bagaimana sinkronisasinya dengan kebijakan pembangunan daerah.

3. Mengevaluasi efektivitas peran pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, termasuk peran pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan masyarakat.
4. Mengukur kendala dan tantangan dalam proses perencanaan yang dapat mempengaruhi efektivitas kelitbangan di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam ilmu pemerintahan, khususnya terkait efektivitas perencanaan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan (kelitbangan) di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam mengevaluasi implementasi Rencana Induk Kelitbangan (RIK) serta relevansinya dalam mendukung pembangunan berbasis riset di daerah.

2. Secara Praktis.

Manfaat secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap :

- a. Evaluasi terhadap efektivitas perencanaan dan implementasi Rencana Induk Kelitbangan (RIK) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung.
- b. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan koordinasi, alokasi anggaran, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan daerah.
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas RIK serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan kelitbangan di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan, program, atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konteks perencanaan kebijakan, efektivitas menilai keberhasilan dalam memenuhi sasaran yang dirancang dalam rencana strategis. Menurut Richard M. Steers (1977), efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, adaptasi terhadap lingkungan, dan integrasi dalam struktur organisasi.

Sementara itu, menurut Riant Nugroho (2018), efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan mekanisme evaluasi. Adapun model efektivitas kebijakan dari George C. Edwards III (1980) menyoroti empat faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi: Seberapa jelas kebijakan dipahami oleh pelaksana dan masyarakat.
2. Sumber daya: Ketersediaan dana, tenaga kerja, dan sarana pendukung.
3. Disposisi (sikap pelaksana kebijakan): Komitmen aktor kebijakan dalam menjalankan kebijakan.
4. Struktur birokrasi: Proses administrasi dan regulasi yang mendukung kebijakan.

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan, program, atau kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konteks perencanaan kebijakan, efektivitas menilai keberhasilan dalam memenuhi sasaran yang dirancang dalam rencana strategis.

Secara lebih spesifik, efektivitas dapat diartikan sebagai:

1. Tingkat Pencapaian Tujuan

Sejauh mana kebijakan atau program berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Dalam konteks Rencana Induk Kelitbangan Daerah (RIKD), ini berarti menilai apakah riset dan pengembangan yang dilakukan memberikan dampak nyata pada pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan..

2. Kesesuaian Antara Hasil Dengan Harapan

Mengukur sejauh mana output yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan kebutuhan daerah. Artinya, apakah hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan benar-benar memberikan solusi konkret terhadap permasalahan daerah.

3. Ketercapaian Dengan Menggunakan Sumber Daya Yang Tersedia

Menilai sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dengan memanfaatkan anggaran, waktu, tenaga, dan teknologi secara optimal. Program yang efektif tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.

2.1.1 Ciri-ciri Efektivitas:

1. Tujuan yang jelas: Ada tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai.
2. Pengukuran hasil: Ada indikator atau parameter untuk menilai apakah tujuan tercapai atau tidak.
3. Pencapaian hasil yang relevan: Hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditentukan.

2.1.2 Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi:

1. Efektivitas lebih fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi lebih berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang

minimal untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Sebuah program bisa sangat efektif (tujuan tercapai), namun belum tentu efisien (menggunakan banyak sumber daya). Sebaliknya, sebuah program bisa efisien (menggunakan sedikit sumber daya), namun tidak efektif jika tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.3 Teori Efektivitas

Teori Efektivitas merujuk pada konsep yang menjelaskan sejauh mana suatu kebijakan, program, atau kegiatan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini digunakan untuk mengukur apakah suatu kebijakan atau perencanaan memberikan hasil yang diinginkan dengan cara yang terukur dan sesuai dengan harapan. Secara umum, teori efektivitas bisa dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada konteks dan bidang aplikasinya. Berikut adalah beberapa teori efektivitas yang relevan untuk menganalisis efektivitas perencanaan Rencana Induk Kelitbangan Daerah (RIKD) Provinsi Lampung.

2.1.4 Teori Efektivitas Kebijakan Publik oleh Riant Nugroho (2018)

Dalam literatur terbaru mengenai efektivitas kebijakan publik, Riant Nugroho (2018) mengemukakan lima prinsip utama yang harus dipenuhi untuk mencapai keefektifan kebijakan:

1. Tepat Kebijakan: Kebijakan harus dirancang untuk secara spesifik memecahkan masalah yang hendak diatasi.
2. Tepat Pelaksana: Implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat atau swasta, atau melalui mekanisme lain yang sesuai dengan konteks kebijakan.
3. Tepat Target: Sasaran yang diintervensi harus sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, dan dalam kondisi siap untuk diintervensi.

4. Tepat Lingkungan: Mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
5. Tepat Proses: Meliputi penerimaan kebijakan (*policy acceptance*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), dan kesiapan strategis (*strategic readiness*).

2.2 Pengertian Perencanaan

Perencanaan kebijakan merupakan proses sistematis untuk menentukan tujuan, merancang strategi, dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai target pembangunan. Menurut Bryson (2011) dalam bukunya "Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations", perencanaan yang efektif harus memenuhi beberapa elemen penting, yaitu:

1. Identifikasi masalah secara akurat.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Penyusunan strategi berbasis data dan riset.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sementara itu, Mintzberg (1994) menguraikan bahwa perencanaan strategis dalam kebijakan publik dapat dilakukan melalui pendekatan rasional, inkremental, dan adaptif, tergantung pada konteks implementasinya.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27).

2.2.1 Definisi Perencanaan Menurut Para Ahli

1. George R. Terry Perencanaan adalah proses dasar dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan dan penentuan sasaran serta cara terbaik untuk mencapainya.
2. Henry Fayol Perencanaan adalah aktivitas untuk memikirkan masa depan, menentukan program, serta menyusun tahapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
3. Steiner (1979) Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif.
4. Louis A. Allen Perencanaan adalah proses menentukan tindakan di masa depan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.
5. Ernest Dale Perencanaan adalah pembuatan keputusan terlebih dahulu mengenai tindakan apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana cara melakukannya.

2.2.2 Unsur-Unsur Perencanaan

1. Tujuan yang Jelas – Perencanaan harus memiliki sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai.
2. Identifikasi Masalah dan Peluang – Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perencanaan.
3. Alternatif Strategi dan Pemilihan yang Tepat – Penyusunan berbagai kemungkinan strategi dan memilih yang paling efektif.
4. Pengalokasian Sumber Daya – Menentukan dan menggunakan sumber daya (keuangan, tenaga kerja, teknologi, dan waktu) secara optimal.
5. Pelaksanaan dan Monitoring – Implementasi rencana dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.

2.2.3 Jenis-Jenis Perencanaan

1. Perencanaan Strategis Merupakan rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi atau wilayah.
2. Perencanaan Taktis Perencanaan jangka menengah yang digunakan untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana yang lebih spesifik dalam suatu unit atau divisi.
3. Perencanaan Operasional Perencanaan jangka pendek yang bersifat teknis dan detail dalam menjalankan kegiatan harian atau program kerja.

2.3 Rencana Induk Kelitangan

Rencana Induk Kelitangan (RIK) adalah dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi daerah dalam mengembangkan kebijakan berbasis riset dan inovasi. Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2016, RIK bertujuan untuk mengarahkan penelitian dan pengembangan daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan. Dalam implementasinya, RIK melibatkan beberapa aspek utama:

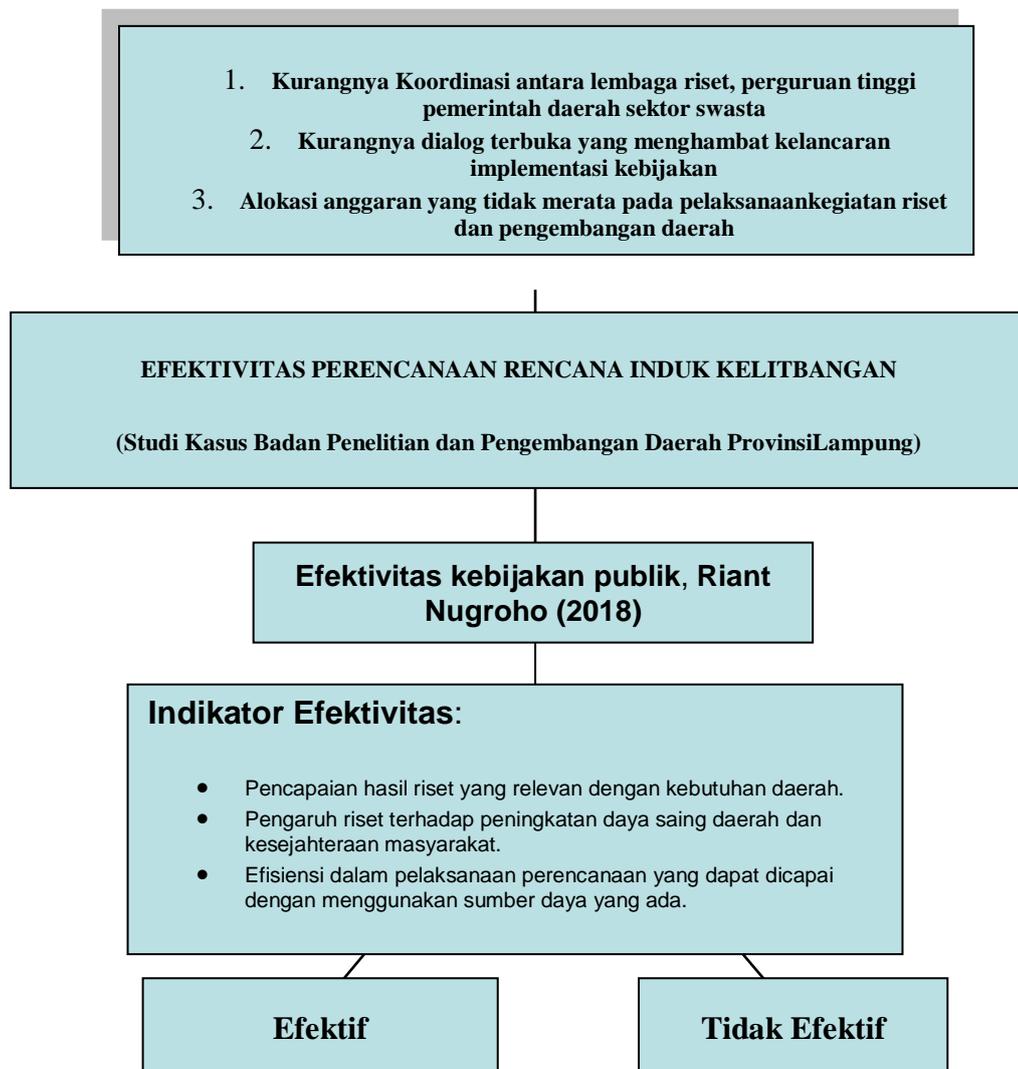
1. Penentuan skala prioritas penelitian.
2. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha.
3. Evaluasi pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan daerah.

Rencana Induk Kelitangan (RIK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitangan memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program kelitangan berbasis pada inovasi daerah, dalam menyikapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, potensi daerah dan layanan publik. Perlu dipahami berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga kelitangan daerah, untuk mencapai hasil yang maksimal lembaga kelitangan daerah perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Kelitangan (RIK). Namun, tantangan utama dalam implementasi RIK adalah kurangnya alokasi anggaran, rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan, serta minimnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini akan menganalisis efektivitas perencanaan RIK di Provinsi Lampung dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas kebijakan dan perencanaan strategis. Kerangka pikir penelitian ini disusun dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan RIK, meliputi perencanaan strategis, implementasi kebijakan, peran pemangku kepentingan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan. :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber : Di olah Peneliti, 2024

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial. (*Lexy Moleong, 2006*).

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut (*Sugiyono, 2008*).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung. Peneliti memilih lokasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung , karena berdasarkan pengamatan di lapangan dalam Peran Perencanaan RIK (Rencana Induk Kelitbangan) di Daerah Provinsi Lampung saat ini ingin menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung dalam 5 tahun kedepan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yang mencakup dengan judul "Efektivitas Perencanaan Rencana Induk Kelitbangan Daerah (RIKD) Provinsi Lampung" dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Pencapaian Hasil Riset yang Relevan dengan Kebutuhan Daerah

Fokus ini menekankan bahwa riset yang dilakukan harus memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan spesifik wilayah. Hal ini bisa berupa:

1. Identifikasi masalah utama yang dihadapi daerah, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan.
2. Penyesuaian pendekatan riset terhadap kondisi dan potensi lokal untuk menciptakan solusi yang terukur.
3. Output riset yang aplikatif dan mudah diadopsi masyarakat setempat.

3.3.2 Pengaruh Riset terhadap Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian harus berkontribusi pada pengembangan daya saing daerah dengan:

1. Mendukung inovasi di sektor produktif daerah (UMKM, pariwisata, agrobisnis, dll.).
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi, layanan, atau produk inovatif hasil riset.
3. Memberikan dampak nyata dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, atau peningkatan kesejahteraan sosial.

3.3.3 Efisiensi dalam Pelaksanaan Perencanaan yang Dapat Dicapai dengan Sumber Daya yang Ada

Riset diarahkan untuk membantu optimalisasi sumber daya daerah melalui:

1. Pemetaan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara efisien.
2. Rekomendasi strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas hasil.
3. Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan daerah untuk menghindari tumpang tindih penggunaan sumber daya.

Pada fokus penelitian ini berusaha mengevaluasi efektivitas perencanaan RIKD di Provinsi Lampung dari berbagai dimensi, mulai dari tujuan perencanaan, pengelolaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, hingga dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana RIKD berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan pengaruhnya terhadap pengembangan riset serta pembangunan daerah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi RIKD di masa depan.

3.4. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini antarlain :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Ibu. Eliyati, S.Kom, M.M.	Kasubag Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2.	Bpk. Fitra Utama, S.IP.,M.SC.	Kasubbid Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
3.	Bpk. Adi Asmariadi Budi S.T	Fungsional Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
4.	Ibu. Ernita S.sos,MM	Kabid Ekonomi Pembangunan, dan KerjasamaBadan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
5.	Bpk. Drs. Hi. Sena Adhi Witarta	Kabid Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Sumber : Di olah Peneliti, 2024

3.5 Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari informan, hasil observasi maupun fakta-fakta yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu Efektivitas perencanaan rencana induk kelitbangan daerah provinsi lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu tektnik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.(Nana Syaodih, 2013). Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian untuk mengoptimalkan data mengenai peran apa saja yang dilakukan balitbangda dalam upaya perencanaan kelitbangan daerah provinsi lampung.

2. Wawancara *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut (Lexy Moloeng, 2005). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran apa saja yang dilakukan balitbangda dalam upaya perencanaan rencana induk kelitbangan daerah provinsi lampung

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Nana Syaodih, 2013). Dokumen yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait proses upaya Perencanaan RIK (Rencana Induk Kelitbangan) Daerah Provinsi Lampung.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3.7.3 Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

3.8 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen) Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

1. Tahap penyajian data : data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
2. Tahap komparasi : merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan Tinjauan Pustaka, yang dikemukakan pada bab 2.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah peneliti lakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Meskipun tujuan dan arah kebijakan yang tertuang dalam RIKD sudah jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Koordinasi yang kurang optimal antara lembaga riset, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kendala utama. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang sistematis juga berkontribusi pada lambatnya pencapaian tujuan kebijakan.

2. Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan

Komunikasi antara para pemangku kepentingan bersifat top-down dan kurang inklusif. Hal ini mengakibatkan terbatasnya partisipasi dari lembaga riset, perguruan tinggi, maupun sektor swasta dalam memberikan masukan maupun mendukung pelaksanaan RIKD. Kurangnya dialog terbuka dan kolaborasi antar pihak juga menghambat kelancaran implementasi kebijakan.

3. Sumber Daya yang Terbatas

Keterbatasan dana, tenaga ahli, dan infrastruktur riset menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan RIKD. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi dan distribusi sumber daya yang tidak merata berdampak pada pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan daerah yang belum maksimal.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam pelaksanaan RIKD masih menunjukkan

ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar lembaga. Tumpang tindih fungsi dan lemahnya koordinasi menyebabkan kurang efisiennya pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan keberhasilan implementasi RIKD, Komunikasi dua arah yang transparan dan inklusif perlu ditingkatkan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk swasta dan masyarakat, Sumber daya manusia dan anggaran riset perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendanaan alternatif (seperti kerjasama dengan sektor swasta), dan pengembangan infrastruktur, Penyederhanaan struktur organisasi dan kejelasan peran antar lembaga akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, efektivitas perencanaan dan implementasi RIKD dapat ditingkatkan sehingga tujuan strategis kelitbangan di Provinsi Lampung dapat tercapai secara optimal.

5.2. Saran

1. Dalam hal ini diharapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung bisa melakukan penyusunan lebih optimal agar suau kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
2. Membangun komunikasi yang baik antar SKPD untuk membangun sebuah kebijakan yang lebih baik lagi untuk lima tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas perencanaan Rencana Induk Kelitbangan Daerah (RIKD) di Provinsi Lampung, penting untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga, meningkatkan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, dan memastikan pendanaan dan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan riset. Selain itu, perbaikan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan riset ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Artur, et al. (2003) manajemen strategi, Vol. 8 No. 2.
- Brinkerhoff & Crosby (2002). Masalah kebijakan kelitbangan Yogyakarta: BPFE.
- Brinkerhoff & Crosby (2002). Langkah-langkah, Rangkaian Aktivitas dan Instrument / Mekanisme Untuk Manajemen Strategi
- Eddy Yunus (2016). Manajemen strategi Jakarta: Indeks.
- Eddy Yunus (2016) aspek aspek manajemen strategi Jakarta: Publisher Salemba Empat.
- Frederickson& Smith, 2003). Metode good governance Jakarta : Kencana.
(Widodo, 2012).*Analisis isi kelitbangan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Grindle, I. (2015). *Implementasi kebijakan* Jakarta: Bumi Aksara.
- George C.Edwards III (sanjaya, 2021) (2004) Dalam pandangan Edwards III.Teori implementasi kebijakan. Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy Moleong, 2006).*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy Moloeng,(2005). wawancara *Cetakan 1*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Miles dan Huberman (1992).reduksi data. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nana Syaodih, (2013).pengertian observasi PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nana Syaodih, 2013.pengertian observasi (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- Petter dan Pierre (1998).Elemen dasar karakteristik dari diskusi *governance*. Jakarta: ELEX Media Computindo Kelompok Gramedia.

RSuyanto dan Sutinah (2006) jeenis pengolahan data metode kualitatif. Jakarta: Granit.

Sugyono, (2008) aspek aspek penelitiankualitatif. Malang: Dioma.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.(2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Suwandi, B. &. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Quinn (2009). *pegerian strategi*. Yogyakarta: Erlangga.

Wheelen and Hunger, 2012) analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), Jakarta Selatan. *Perspektif* , 114.

Menurut Undang Undang

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Permendagri 17 tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 209 dan 219 mengamanatkan pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dan penelitian pengembangan.

Dalam Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penilaian inovasi daerah.

Dalam Undang- UndangU No 18/2002 tentang Sisten Nasional Litbang dan Penerapan Iptek.

Dalam Permendagri No 20/2011 tentang Pedoman Litbang di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek.

Dalam Undang-undangU No 03/2012 dan No 36/2012 tentang penguatan SIDA.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05 – 474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28).
- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019)